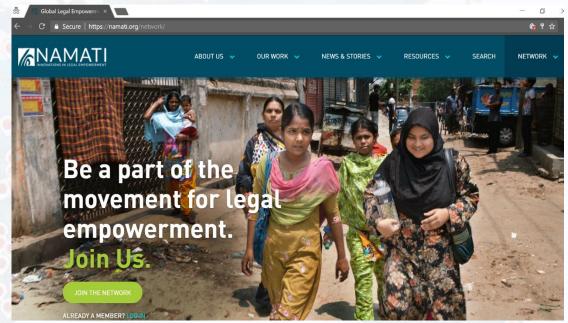
The Global Legal Empowerment Network

If you're helping people to know, use, and shape the law, you are one of us.

We are more than 1,000 organizations and 3,900 people

- Share ideas and challenges with other members through online community discussions
- Attend in-person learning exchanges and the legal empowerment leadership course
- Join regional and global advocacy campaigns
- Access over 1,000 carefully curated resources



It's free and simple - join the movement for legal empowerment today!

https://namati.org/network community@namati.org twitter: @namatiglobal

IMPLEMENTING SDGS 16.3 IN INDONESIA



Identifying access to justice indicators for SDG 16.3: integrating into National Medium Term Development Plan 2015 – 2019

GLOBAL INDICATORS

- Proportion of victims of violence in the previous 12 months who reported their victimization to competent authorities or other officially recognized conflict resolution mechanisms
- 2. Unsentenced detainees as proportion of overall prison population

National Indicators

- Numbers of poor people who get legal aid either litigation and non litigation (National Target)
- 2. Justice sector services for poor people through Mobile Court, Prodeo or the allowance for litigating civil cases without cost, and Legal Service Post (National Target)

Measuring A2J in Indonesia: Metadata from stakeholders database

1. Proportion of victims of violence in the previous 12 months who reported their victimization to competent authorities or other officially recognized conflict resolution mechanisms

victims of violence in the previous 12 months $<math display="block">\frac{who \ reported \ their \ victimization}{numbers \ of \ crime \ victims} x100\%$

2. Unsentenced detainees as proportion of overall prison population unsentenced detainees

 $\overline{overall\ prison\ population}\ x\ 100\%$

Measuring A2J in Indonesia: Metadata from stakeholders database

3. Numbers of poor people who get legal aid either litigation and non litigation (National Target)

(poor people who get litigation or non litigation legal aid

4. Justice sector services for poor people through Mobile Court, Prodeo or the allowance for

litigating civil cases without cost, and Legal Service Post (National Target)

) judicialservice for poor people through mobile court, prodeo and legal service post

IMPLEMENTING SDG 16.3 on LEGAL AID: strong Cooperation with CSOs

NATIONAL LAW DEVELOPMENT AGENCY, MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

BUDGET

REGULATIONS



405 LEGAL AID PROVIDERS (CSOs)

LITIGATION

NON LITIGATION



POOR POEPLE, MARGINALIZED, VULNERABLE

POVERTY PROOF LETTERS

Legal aid service



Non litigation

- 1 Consultation,
- 2. Mediation,
- 3. Negotiation,
- 4. Investigation,
- 5. Out-of-court Custody,
- 6. Document drafting,
- 7. Legal awareness campaign,
- 8. Legal research
- 9. People legal empowerment

EXPANDING LEGAL AID

PUBLIC LEGAL EDUCATOR

ACCESS TO JUSTICE

Goal

Public legal
awareness
(MID TERM
National
Development)

LEGAL AID PROVIDER

PARALEGAL

Community CSO

village

Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration

OBH

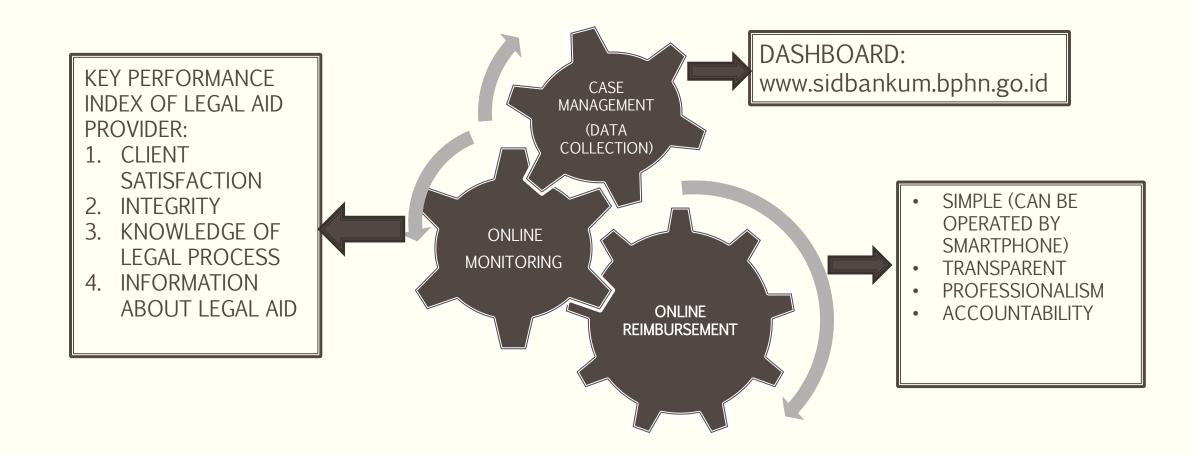
Ministry of Law & HR

"OVOP"



MEASURING QUALITY OF LEGAL AID

USING APPLICATION: DATABASE INFORMATION SYSTEM OF LEGAL AID



MONITORING TOOLS

- Objective:
 - Maintain quality as stated in Legal Aid Service Standard

- Method:
- Interview with the beneficiaries



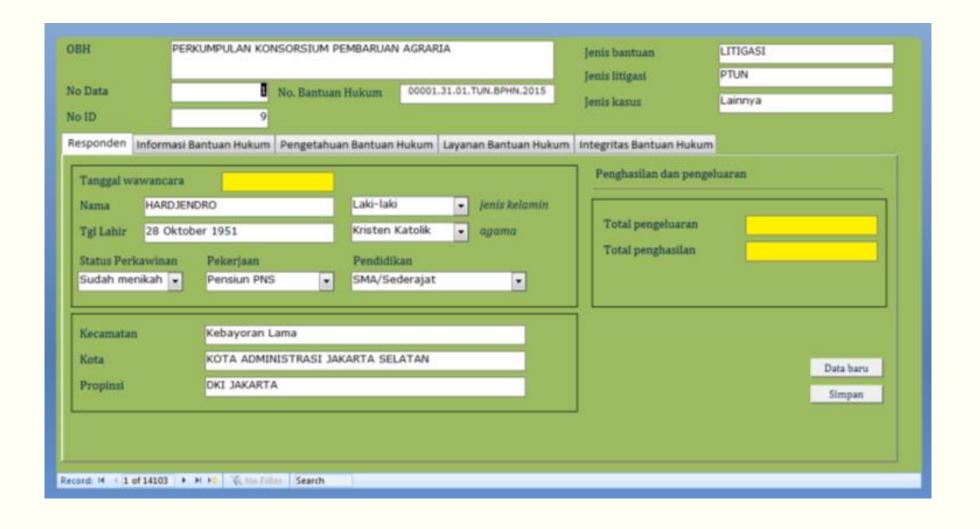
Lampiran 1 (Kuesioner untuk Dewasa)

KUESIONER

Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Hukum

1. Nama			
2. Jents Kelamin	Perempuan	- Laki-li	akt
3. Usta	envisor envisor		Tahun
4. Status Perkawinan			
1. Belum menikah	3. Tidak menikah	5, land	a/Duda kemattan
2. Menikah 4. Janda/D	uda ceral 6. Tidak tahu	77. Tidak	Tahu 88. Tidak Jawab
5. Pendidikan formal tera	khir yang Bapak/Ibu/	Saudara ta	matkan:
1. Tidak sekolah	0.0	9. Tam	at SMP keagamaan
2. Tidak tamat SD		10. Tan	nat SMA/SMK Umum
3. Tamat SD umum		11. Tan	nat Madrasah Aliyah
4. Tamat Madrasah Ibti	datyah		nat diploma
5. Tamat SD keagamaa		13. Tan	nat SMA keagamaan lain
6. Tidak tahu			nat sarjana (S1)
7. Tamat SMP umum		15. Tamat sarjana (S2)	
77, Tidak Tahu		16. Tan	nat sarjana (S3)
88. Tidak Jawab			
6. Pekerjaan Bapak/Ibu/S	audara		
1. Pelajar/Mahasiswa	6. Pegawai BUMN		11. Pekerja lepas/Penggarap
2. Ibu Rumah Tangga	7. Pegawai Swasta	Nasional	12. Wrausaha (Non pedagan
Tidak bekerja	8. Pegawal Swasta	Astng	13. Pedagang
4. Penstunan	9. Pegawai Yayasa		14.Lainnya
Pegawai Negeri Sipil	10. Petani/Nelayani	Penilik	77. Tidak Tahu 88. Tidak Jawa
7. Berapa rata-rata pengi	duaran total keluarga	(inti)	
Bapak/Ibu/Saudara set	tap bulan ?	Г	
(bukan pengeluaran In	dividu) Rp		
8. Berapa rata-rata pengi	astlan total keluarna	Ones	
Bapak/Ibu/Saudara set		Chestale .	

Online Monitoring



Kuesioner dan Index

Pertanyaan	Jawaban	Index		
A. INFORMASI TENTANG BANTUAN HUKUM				
Darimana Bapak/Ibu/Saudara mengetahui informasi tentang bantuan hukum ?	Media (koran/ televisi/internet)	0,0060		
	Saudara/keluarga	0,0015		
	Teman/kolega	0,0015		
	Pengacara/advokat	0,0060		
	Kepolisian	0,0030		
	Iklan layanan masyarakat	0,0030		
	Aparat pemerintah	0,0015		
	Aktifis LSM	0,0045		
	Sosialisasi pemerintah	0,0030		
	Tidak Tahu	0,0000		
	Tidak Jawab	0,0000		
	Lainnya	0,0000		
	Keluarga	0,0075		
	Aktivis/LSM	0,0075		
	Kepolisian	0,0050		
	Advokat/pengacara	0,0075		
Siapa Pihak yang	LBH	0,0050		
menyarankan/mengajak	Wartawan/jurnalis	0,0025		
Bapak/Ibu/Saudara untuk	Dosen	0,0050		
mendapat bantuan hukum ?	Kolega/teman	0,0075		
	Aparat pemerintah	0,0025		
	Tidak Tahu	0,0000		
	Tidak Jawab	0,0000		
	Lainnya	0,0000		
Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ?	Mengurus sendiri	0,0010		
	Keluarga	0,0010		
	Kepolisian	0,0020		
	Pengacara/advokat	0,0040		
	ОВН	0,0040		
	Penetapan pengadilan	0,0020		
	Aparat pemerintah	0,0020		
	Aktifis LSM	0,0030		
	Kolega/teman	0,0010		
	Tidak Tahu	0,0000		
	Tidak Jawab	0,0000		
	Lainnya	0,0000		

Buku Panduan Tool Monitor dan Evaluasi

B. PENGETAHUAN TENTANG BAN	ITUAN HUKUM	
	Cara mendapatkan bantuan hukum	0,0150
Tahu atau tidak tahukah Bapak/Ibu/Saudara dengan hal- hal berikut ini	Aturan etika pekerja bantuan hukum di internal OBH	0,0150
	Cara untuk mengetahui semua perkembangan proses hukum	0,0150
	Tata cara pengawasan internal dalam proses bantuan hukum	0,0150
	Tata cara, mekanisme, dan prosedur bantuan hukum selama ini	0,0150
	Jenis layanan bantuan hukum yang diberikan	0,0150
Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah hal-hal berikut ini Anda alami dan rasakan saat mendapatkan bantuan hukum ?	Prosedur bantuan hukum mudah (tidak berbelit belit)	0,0183
	Ada penjelasan soal alur/tahapan bantuan hukum	0,0183
	Pihak yang melayani bantuan hukum (advokat) bisa bekerjasama	0,0183
	Ada kejelasan soal waktu yang dibutuhkan dalam proses hukum terkait	0,0183
	Mendapatkan perlakuan yang sama antar sesama penerima bantuan hukum	0,0183
	Ada penjelasan mengenai visi,misi, maklumat atau pakta integritas penerima bantuan hukum	0,0183
C. LAYANAN BANTUAN HUKUM	-	
	Berperilaku baik (santun/sopan/ramah)	0,0057
	Profesional (memegang teguh konstitusi)	0,0057
Apakah pelaksana pemberi bantuan hukum	Tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan klien	0,0057
(advokat/paralegal) yang melayanai kasus hukum	Tidak menyimpang dari prosedur (taat hukum)	0,0057
Bapak/Ibu/Saudara melakukan hal-hal berikut ini	Mendapatkan penjelasan tentang kasus hukum yang dihadapi	0,0057
	Mendapatkan informasi terhadap perkembangan proses hukum yang dihadapi	0,0057
	Mendapatkan upaya perlindungan	0,0057

6

The Global Legal Empowerment Network

If you're helping people to know, use, and shape the law, you are one of us.

We more than 1,000 organizations and 3,900 people

- Share ideas and challenges with other members through online community discussions
- Attend in-person learning exchanges and the legal empowerment leadership course
- Join regional and global advocacy campaigns
- Access over 1,000 carefully curated resources



It's free and simple - join the movement for legal empowerment today!

https://namati.org/network community@namati.org twitter: @namatiglobal